

PPKM JAWA BALI MULAI SENIN

Kota Tangerang Sosialisasikan Instruksi Mendagri

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota Tangerang akan melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali mulai Senin mendatang. PPKM Jawa Bali itu dilaksanakan mulai 11-25 Januari 2021 sesuai Instruksi Mendagri, Tito Karnavian.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah mengatakan ketentuan PPKM Jawa Bali tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. "Secepatnya Pemkot akan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri dalam penangan PPKM Jawa-Bali," kata Arief di Tangerang, Jumat (8/1).

Kota Tangerang masuk dalam daftar wilayah PPKM Jawa Bali di Provinsi Banten bersama dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Wali Kota Arief meminta masyarakat Kota Tangerang untuk menerapkan protokol kesehatan bila melakukan aktivitas luar ruangan. "Patuhi protokol kesehatan

4M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Pembatasan sosial seperti acara resepsi pernikahan dan khitanan tidak diperbolehkan dengan prasmanan tapi diganti dengan nasi box," katanya.

Selama pembatasan sosial ini, kegiatan perkantoran hanya bisa diisi dengan kapasitas 25 persen dan kegiatan belajar mengajar dijalankan secara online. Sektor esensial, khusus untuk kebutuhan pokok dan kegiatan konstruksi masih diperbolehkan beroperasi 100 persen dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pada penerapan PPKM sesuai Instruksi Mendagri ini, jam operasional pusat perbelanjaan dibatasi hanya sampai pukul 19.00 dan restoran hanya bisa diisi dengan kapasitas 25 persen. "Kita juga akan mengimbau segala kegiatan ekonomi untuk membatasi kapasitas dan ikuti protokol kesehatan secara ketat. Ini kita siapkan dalam rangka optimalisasi bagaimana memutus dan menekan angka penularan Covid-19 yang ada di Kota Tangerang," katanya. ● pp

Rata-rata 70 Warga Kota Bogor Terpapar Covid-19 Setiap Harinya

BOGOR (IM)- Warga Kota Bogor yang terpapar Covid-19 makin sulit mendapatkan perawatan. Hal itu karena jumlah penambahan pasien Covid-19 di Kota Bogor makin tak terkendali. Dalam empat hari terakhir saja, rata-rata 70 warga Kota Bogor terpapar Covid-19. Angka tersebut merujuk pada data Dinas Kesehatan Kota Bogor yang mencatat penambahan 294 kasus positif dalam empat hari.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, pasien kasus positif Covid-19 semakin sulit mendapat perawatan di ruang isolasi di rumah sakit maupun tempat isolasi khusus. Karena itulah, Pemerintah Kota Bogor menyiapkan Rumah Sakit Lapangan (RSL) di Komplek GOR Pajajaran, yang memiliki daya tampung 70 tempat tidur untuk pasien positif. Rumah sakit lapangan tersebut, saat ini masih dikerjakan antara lain pemasangan lift maupun fasilitas pendukung lainnya. Bima Arya menargetkan, RSL di Komplek GOR Pajajaran ini sudah bisa beroperasi pada pertengahan Januari 2021.

Hingga Kamis, 7 Januari 2021, Dinas Kesehatan Kota Bogor, mencatat tambahan sebanyak 292 warga Kota Bogor yang

terkonfirmasi positif. Penambahan tersebut terjadi dalam empat hari terakhir sehingga akumulasi kasus positif di kota hujian itu mencapai 5.918 kasus.

Berdasarkan data harian penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Bogor, warga Kota Bogor yang terkonfirmasi positif, pada Kamis, 7 Januari 2021 sebanyak 74 kasus.

Sementara pada Rabu, 6 Januari 2021 sebanyak 73 kasus, pada Selasa, 5 Januari 2021, 73 kasus, serta pada Senin, 4 Januari 2021, sebanyak 72 kasus. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penyebaran Covid-19 di Kota Bogor pada pekan ini rata-rata sekitar 70-an kasus per hari dan trennya terus meningkat.

Dari 5.918 kasus positif Covid-19, saat ini ada 1.006 kasus positif yang masih sakit, ada 135 kasus positif meninggal dunia, serta 4.630 kasus positif telah dinyatakan sembuh.

Jumlah 1.006 kasus positif yang masih sakit itu, menunjukkan angka yang sangat tinggi, karena daya tampung rumah sakit di Kota Bogor untuk pasien positif hanya 591 tempat tidur. Sementara daya tempat tidur isolasi untuk pasien positif tanpa gejala di Lido hanya 100 tempat tidur. ● gio



IDN/ANTARA

BANJIR LAHAR HUJAN RUSAK PIPA SUMBER AIR

Penjaga peringatan dini erupsi Gunung Merapi Musdiantoro menunjukkan pipa air di aliran Sungai Boyong, Turgo, Pakem, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (8/1). Luncuran material banjir lahar hujan dari puncak Gunung Merapi memutus saluran pipa sumber air bersih dari Turgo untuk warga Dusun Kaliurang, Ngandong dan Boyong.

Sekretaris Desa Jagabaya-Bogor Dilaporkan Mencuri Kendaraan

BOGOR (IM)- Seorang Sekretaris Desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan tindak pidana pencurian kendaraan.

Informasi yang diperoleh kemarin menyebutkan, oknum berinisial D yang dikabarkan juga sebagai anak Kepala Desa Jagabaya, Rohayati, telah dilaporkan ke Polres Bogor.

Pengaduan yang disampaikan oleh Apriyanto tersebut karena menilai D telah melakukan tindak pidana yang sangat merugikannya. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (4/1) ketika satu unit kendaraan truk hendak mengambil air di Depo Air Desa Jagabaya. Kunci kendaraan diambil sehingga tidak bisa dibawa pulang. "Telah terjadi pencurian kendaraan bermotor dengan cara menyandera dan menahan kunci kendaraan," demikian pengaduan yang disampaikan ke Polres Bogor tersebut.

Pihak kepolisian dikabarkan akan menindaklanjuti laporan tersebut secepatnya. Sementara itu jajaran pemerintahan Desa Jagabaya belum bisa dikonfirmasi.

Sebelumnya warga Jagabaya juga diresahkan dengan dugaan pungutan liar (pungli) yang di-

lakukan aparat pemerintahan desa. Sayangnya, dugaan tersebut sepertinya tidak berlanjut dengan proses hukum. Beberapa warga yang merasa dirugikan sangat berharap agar pihak Polsek Parung Panjang bisa memproses dugaan pungli tersebut.

Saat itu, salah satu oknum perangkat Desa Jagabaya telah membuat surat dan meminta iuran bulanan kepada sejumlah pelaku usaha di wilayah tersebut. Dalam suratnya disebutkan perlunya iuran bulanan sebesar Rp 100.000 sebagaimana diatur dalam beberapa aturan di Kabupaten Bogor, peraturan desa dan keputusan kepala desa setempat.

"Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No. Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Desa, Perda Kabupaten Bogor No. 9 Tahun 2006 tentang Desa, Perdes No. 002 tahun 2003 tentang Pedoman Pemungutan Iuran Pendapatan Asli Desa," demikian cuplikan surat tersebut. Kasus dugaan pungli itu sempat mencuat sehingga beberapa aparat desa Jagabaya yang dipimpin Sekretaris Desa (Sekdes), Dian Qori sudah mendatangi Mapolsek Parungpanjang. Pihaknya dikabarkan melakukan pengaduan terkait tuduhan yang beredar karena dinilai sebagai fitnah. ● pra

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI DI BANDUNG

Warga membawa pulang Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) di Ciroyom, Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/1). Jelang pemberlakuan pengetatan pembatasan pergerakan pada pekan depan, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mengusulkan agar 183.174 keluarga penerima manfaat di Kota Bandung memperoleh bantuan dari Kementerian Sosial.

Ade Yasin Optimistis 2021 Pembangunan Huntap Korban Bencana Selesai

Saat ini ribuan pengungsi masih tinggal di hunian sementara (Huntara). Kedepan dengan selesainya proyek pembangunan Huntap maka kehidupan mereka bisa lebih layak lagi karena selain luas lahannya 100 meter, type bangunan Huntapnya pun cukup luas yaitu 36 meter, kata Ade Yasin.

CIBINONG (IM)-

Pemerintah pusat tengah membangun hunian tetap (huntap) di dua desa di Kabupaten Bogor, yakni Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg dan Desa Urug, Kecamatan Sukajaya. Huntap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat korban bencana di Kabupaten Bogor awal 2020.

Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin menjelaskan, pembangunan huntap di dua lokasi tersebut dilaksanakan secara multi years. Serta sedang berlangsung sejak 2020 hingga 2021.

"Semoga saja pembangunannya bisa selesai seluruhnya di 2021 dan masyarakat korban bencana bisa segera menepati Huntap ini," ujarnya,

kemarin.

Selain itu, Ade Yasin juga akan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat agar pembangunan huntap pada dua desa tersebut ditambah. "Sebab ada 2.000 kepala keluarga (KK) yang terdampak bencana," lanjutnya.

Ade Yasin bersyukur progres proyek pembangunan 563 unit Huntap sudah berjalan baik, hal itu karena sangat dibutuhkan oleh para pengungsi korban bencana alam tanah longsor dan banjir bandang.

"Saat ini ribuan pengungsi masih tinggal di hunian sementara (Huntara), kedepan dengan selesainya proyek pembangunan Huntap maka kehidupan mereka bisa lebih

layak lagi karena selain luas lahannya 100 meter, type bangunan Huntapnya pun cukup luas yaitu 36 meter," tukas Ade.

Siapkan 52 Hektar

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Pemkab Bogor harus menyiapkan lahan seluas 52 hektare untuk membangun 2.000 unit hunian tetap (Huntap).

Hanya saja, untuk tahap awal 563 unit Huntap di lahan seluas 14 hektare akan siap di huni oleh para korban bencana alam tanah longsor dan banjir bandang warga Kecamatan Sukajaya dan Cigudeg pada akhir Tahun 2021 mendatang.

"Pemanfaatan lahan seluas 52 hektare sudah dimohonkan oleh Pemkab Bogor kepada PT. Perkebunan Nusantara VIII Cikarang dan Kementerian ATR/BNP untuk dibangun 2.000 unit Huntap, saat ini baru total 14 hektare di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya dan Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg yang sudah kami manfaatkan untuk membangun 563 unit Huntap di mana bisa di huni pada akhir tahun ini," ucap Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan

Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Lestya Irmawati, kemarin.

Mantan Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Litbang ini menerangkan jajarannya juga sudah mengusulkan ke Direktorat Penyediaan Perumahan KemenPU-PR, Pemprov Jawa Barat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membangun lagi 1.000 unit Huntap.

"Kebutuhan masyarakat korban bencana alam tanah longsor dan banjir bandang di awal Januari tahun lalu kan 2.000 unit hingga kami mengusulkan lagi permohonan bantuan pembangunan lagi 1.000 unit Huntap kepada Direktorat Penyediaan Perumahan KemenPU-PR, Pemprov Jawa Barat dan BNPB. Pemkab Bogor sendiri sudah menganggarkan Rp 25 miliar untuk membantu para korban untuk bersama BNPB membangun 500 unit Huntap di antaranya," terangnya.

Irma sapaan akrabnya menjelaskan bahwa terbanyaknya pembangunan Huntap karena terkendala ketersediaan lahan dan persetujuan para korban bencana alam tanah

longsor dan banjir bandang.

"Saat ini lahan yang dibutuhkan belum seluruhnya tersedia, lalu tidak semua korban bencana alam tanah longsor dan banjir bandang mau direlokasi ke Huntap, namun dengan sudah dibantu dan kualitas bangunannya yang baik saya yakin mereka perlahan-lahan akan setuju apabila nanti hendak direlokasi ke lahan yang tidak rawan bencana alam ini," jelas Irma.

Ia menambahkan dari 538 unit Huntap yang saat ini sedang dibangun, 62 persen di Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg dan 22 persen di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya di antaranya sudah terbangun oleh penyedia jasa pemenang lelang proyek pembangunan Huntap.

"Info dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Penyediaan Perumahan KemenPU-PR, progres proyek pembangunan 205 unit Huntap di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya sudah 22 persen dan untuk proyek pembangunan 358 unit Huntap di Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg sudah mencapai 62 persen," tambahnya. ● gio

Wali Kota Bandung Positif Covid-19

BANDUNG (IM)- Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengabarkan dirinya dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 dengan status orang tanpa gejala (OTG), Jumat.

"Saya menginformasikan bahwa saat ini saya positif terpapar virus korona, dengan kategori tanpa gejala," kata Oded dalam keterangannya di unggahan akun media sosial Humas Kota Bandung.

Setelah dinyatakan positif Covid-19, Oded mengatakan dirinya langsung melakukan isolasi mandiri. Namun ia belum menyebut secara rinci di mana ia melakukan isolasi mandiri itu. Dia pun meminta kepada setiap orang yang merasa pernah bertemu dengan dirinya sejak 4 Januari

hingga 7 Januari, agar berinisiatif melakukan karantina mandiri sebagai langkah mitigasi. "Kemudian jika ada gejala yang diderita, agar secepatnya menghubungi puskesmas terdekat," kata Oded.

Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Mulai dari mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan tidak berkerumun. Selain itu, ia pun meminta kepada masyarakat agar menjaga kebugaran tubuh di masa pandemi Covid-19 untuk mencegah keterpaparan.

"Saya meminta doa kepada masyarakat Bandung supaya cepat sembuh dan melalui proses karantina dengan tanpa kendala," katanya. ● pur

ANGKA KEMATIAN CAPAI 5,9 PERSEN

Kabupaten Cirebon Zona Merah Corona

CIREBON (IM)- Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kembali masuk kategori zona merah atau berisiko tinggi penyebaran Covid-19. Angka kematian akibat Covid-19 di Cirebon mencapai 5,9 persen.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni mengatakan angka kematian yang mencapai 5,9 persen dari total kasus Covid-19 itu terbilang tinggi. Hingga Rabu (6/1) kemarin, Enny menyebutkan total kasus pasien positif Covid-19 mencapai 4.083 orang. "Salah satu indikator masuk zona merah penyebaran Covid-19 itu angka kematian tinggi. Kematian mencapai 241 orang atau 5,9 persen dari total kasus," kata Enny, Jumat (8/1).

Lebih lanjut, Enny menyebutkan, dari 4.083 pasien

positif, sebanyak 2.867 pasien sembuh dan 975 masih dalam perawatan. Enny meminta masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) untuk membantu meminimalisir lonjakan kasus Covid-19.

Selama ini, Enny mengaku Dinkes Kabupaten Cirebon gencar melakukan swab atau tes usap ke masyarakat. "Kita sudah puluhan ribu tes PCR, tapi hasilnya banyak yang positif. Setiap ada yang konfirmasi positif kita selalu tracing, sampai 20 orang lebih yang kita tracing," kata Enny.

"Kita sudah kerja keras. Kita mengimbau masyarakat jangan nongkrong, nongkrong di kafe. Tetap di rumah. Disiplin prokes," kata Enny menambahkan. ● pur



IDN/ANTARA

KELANGKAAN GAS ELPIJI 3 KILOGRAM

Sejumlah warga mengantre saat membeli gas elpiji 3 kilogram bersubsidi di Kampung Pasar Kulon, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (8/1). Warga setempat kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kilogram sejak dua pekan terakhir akibat keterlambatan pasokan, sehingga harga di tingkat pengecer naik menjadi Rp23 ribu sedangkan di pangkalan mencapai Rp18 ribu per tabung.